

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN ARSIP  
PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

*E-Journal*



**OLEH**

**MIRA**

**NIM : 090563201073**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2014**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan implementasi sistem informasi pengelolaan arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan penelitian meliputi: Bagaimanakah implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Riau?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip di Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian yang peneliti lakukan ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Penulis berupaya melihat fakta-fakta sesuai dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan lingkup penelitian ini. Kemudian mendeskripsikannya secara jelas guna memberikan gambaran tentang sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang dilakukan melalui langkah-langkah, yaitu mengelompokkan data yang berkaitan dengan proses implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah proses implementasi sistem informasi pengelolaan arsip di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepulauan Riau masih belum berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa kendala yang masih terlihat, seperti: sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi, sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, dukungan dana yang juga masih terbatas, ketersediaan *hardware* dan *software* yang juga masih terbatas, serta dukungan sumber daya jaringan yang juga belum memadai.

**Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi, Pengelolaan Arsip**

## ABSTRACT

*This study is limited to the management of information systems implementation issues archives at the Library and Archives of Province of Riau Islands. Research problems include. How is the implementation of management information systems in the archives at the Library and Archives of Riau Islands Province?*

*The purpose of this study is to investigate the implementation of management information systems in the archives at the Library and Archives of Riau Islands province, to determine the factor-factor that supports the management of archives at the Library and Archives of Riau Islands Province, and to determine the factors that hinder the implementation of the system information in records management at the Library and Archives of Riau Islands province.*

*The study investigators did this belong to a qualitative descriptive study. The study is a qualitative descriptive study of variables, without making comparisons or connect with other variables. The author seeks to look at the facts in accordance with the phenomenon that occurs in accordance with the scope of this study. Then describe it clearly to provide an overview of information systems in the management of the Agency library archives and Riau Islands Provincial Archives.*

*He data collection technique used was to use interview techniques and documentation. While the techniques of data analysis through the steps, which classify the data relating to the implementation of information systems in the management of archives at the Library and Archives of Riau Islands Province.*

*The results obtained are management information system implementation process archives in the Library and Regional Archives (BPAD) Riau Islands is still not running smoothly as expected. There are several obstacles that are still visible, such as the existing infrastructure is not sufficient, human resources (HR) is still limited, financial support is still limited, the availability of hardware and software that is also still limited, as well as the support of network resources is inadequate.*

*Keyword : implementation, Information Systems, Management of Records*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia hari demi hari atau waktu demi waktu mengalami kemajuan yang sangat tinggi. Kondisi ini sangat terasa setelah reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998. Lihat saja berbagai bentuk informasi yang dibutuhkan sangat mudah dapat diakses saat ini. Seakan tidak ada lagi dinding penghambat untuk memperoleh berbagai bentuk informasi yang dibutuhkan.

Ketersediaan berbagai bentuk layanan informasi tersebut seakan memanjakan manusia. Betapa tidak, dengan berbagai bentuk fasilitas teknologi sistem informasi yang tersedia, mulai dari yang berbentuk televisi, telepon, radio, maupun jaringan internet yang kini sudah dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Apakah mereka yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Jika selama ini jaringan internet hanya dapat dinikmati masyarakat perkotaan, saat ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Mereka hanya cukup menggunakan fasilitas yang diberikan pihak Telkom, seperti *speedy*, langsung dapat menikmati jaringan internet.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, khususnya teknologi layanan informasi, mau tidak mau, penguasaan keterampilan menggunakan teknologi informasi sangatlah penting. Penguasaan keterampilan pemanfaatan teknologi informasi oleh seseorang akan sangat membantu dalam hal menyusun perencanaan maupun

dalam hal pengambilan sebuah keputusan yang cepat dan tepat. Ketersediaan layanan teknologi informasi yang begitu sempurna akan sangat membantu masyarakat dalam peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan penggunaan sistem informasi yang terlengkap. Dengan adanya usaha untuk menguasai sebanyak-banyaknya sistem informasi maka ke depan tidak dapat dipungkiri masyarakat tersebut akan cepat berkembang dan maju. Baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, maupun budaya. Inilah yang disebut masyarakat yang *well-informet*.

Mungkin dulunya orang tidak membayangkan bahwa informasi itu sangatlah penting artinya tapi sekarang sejalan tidaklah demikian. Globalisasi memang selain membawa efek negatif juga membawa efek positif. Situasi yang terlihat hari ini tidak lain adalah efek positif dari globalisasi tersebut. Penguasaan informasi yang dulunya tidaklah menjadi suatu kebutuhan akan tetapi kini menjadi kebutuhan primer (pokok) dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di berbagai instansi-instansi yang ada saat ini.

Informasi yang memuaskan dapat diperoleh masyarakat tentu harus didukung sistem layanan yang baik, yaitu sistem yang mudah dan cepat digunakan. Bukan sistem yang serba rumit, memakan waktu lama, dan tidak praktis. Sistem layanan yang sederhana, cepat, dan praktis seperti ini sudah saatnya untuk diimplementasikan agar masyarakat tidak kecewa dalam memperoleh layanan.

Ketersediaan sistem layanan yang sederhana, mudah, dan praktis akan membantu dalam melaksanakan berbagai pekerjaan secara lebih cepat dan akurat. Selain untuk menghemat biaya yang timbul, waktu yang dibutuhkan, dan tenaga yang dikeluarkan juga tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai dan pengambilan keputusan akan lebih cepat

dapat dilaksanakan. Tak terkecuali di lembaga layanan, seperti perpustakaan daerah, sekolah, kampus, maupun lembaga penjual jasa lainnya.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan penggunaan sarana perpustakaan, seperti peminjaman buku maupun ruangan baca bagi masyarakat yang membutuhkannya. Agar masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan ini tidak kecewa maka sistem pelayanan yang diberikan hendaklah memuaskan. Salah satunya adalah sistem pelayanan yang tersedia sangatlah sederhana, mudah, dan cepat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Riau maka diperlukan efisiensi kerja. Efisiensi itu sendiri merupakan penyederhanaan kerja agar tidak memakan waktu yang lama. Menurut Gie (2000:171) efisiensi adalah suatu asas dasar tentang perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya. Pengertian efisiensi pada prinsipnya merupakan perbandingan terbaik atau rasionalitas antara hasil yang diperoleh (*output*) dengan kegiatan yang dilakukan serta sumber-sumber dan waktu yang dipergunakan (*input*). Salah satu dimensi penting dalam sebuah lembaga adalah tata kerja yang teratur, terencana, dan tersusun dengan rapi agar memudahkan dalam pengawasan dan monitoring terhadap hasil yang telah dicapai dan tercipta suatu efisiensi.

## **B. KERANGKA TEORITIS**

Definisi berkaitan dengan kata implementasi dikemukakan para ahli. Menurut Syafri dan Setyoko (2008:22), “Implementasi adalah suatu strategi atau cara dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu”

Sistem informasi menurut Murdick, Ross, dan Clagget (1993:6), “Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.

Masing-masing memiliki fungsi dan kemampuan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan berbagai media untuk dijadikan dan ditampilkan sebagai suatu informasi.

Sistem informasi disini diartikan sebagai suatu mekanisme yang mengatur data dan informasi mulai dari pengumpulan, pemilihan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, penyajian, pendistribusian kepada para manajemen atau masyarakat yang membutuhkan. Sistem tersebut juga mengatur segala hal yang berhubungan, saling berkaitan, saling ketergantungan, dan saling mendukung, dari berbagai komponen dan fungsi kegiatan yang ada pada badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi kepulauan Riau.

Menurut Wursanto ( 1991:12), yang dimaksud dengan kata *kearsipan* adalah suatu proses atau usaha, yang dilakukan oleh setiap badan usaha, baik badan usah pemerintahan maupun swasta, menyangkut pekerjaan yang berkaitan dengan penyimpanan warkat atau surat surat atau dukumen kantor lainnya

Edwards III (1980:10-11) mengemukakan gagasannya bahwa dalam hal penerapan kebijakan publik ada beberapa indikator yang berpengaruh. Indikator tersebut meliputi: (1) *communication*, (2) *resources*, (3) *dispositions*, dan (4) *bureaucratic structure*.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik Informan

**Tabel IV.1**

#### **Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase %</b>
<b>1</b>	Laki-laki	3	50
<b>2</b>	Perempuan	3	50
	<b>Jumlah</b>	6	100

**Sumber :** Data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 3 orang atau 50% dan jumlah responden perempuan yaitu sebanyak 3 orang dengan persentase 50% dengan demikian responden penelitian ini didominasi oleh perempuan.

Selanjutnya mengenai karakteristik responden menurut kelompok umur yang memberikan jawaban dalam penelitian ini dapat dilihat table IV.2 berikut ini:

**Tabel IV.2**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Umur (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase %
1	30 – 35	2	20
2	36 – 40	4	80
	<b>Jumlah</b>	6	100

*Sumber : Data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau*

Dari tabel IV.2 tersebut dapat diketahui bahwa dalam penelitian responden yang mempunyai kelompok umur 30 – 35 tahun sebanyak 2 orang atau 20% dan kelompok umur 36 – 40 sebanyak 4 orang atau 80%.

**Tabel IV.3**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase %
1	Sarjana / S2	1	10
2	Sarjana / S1	4	80
3	Diploma 3	1	10
4	<b>Jumlah</b>	6	100

*Sumber : Data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau*

Berdasarkan tabel IV.3 tersebut dapat diketahui responden yang berpendidikan Sarjana (S2) sebanyak 1 orang atau 10%, responden yang berpendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4 orang atau 80%, dan responden yang berpendidikan Diploma 3 (D3) berjumlah 1 orang atau 10%.



**Tabel IV.4**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepegawaian**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase %</b>
<b>1</b>	PNS	6	100
<b>2</b>	Honorer atau PTT	0	0
<b>4</b>	<b>Jumlah</b>	6	100

*Sumber : Data Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau*

Dilihat dari tabel IV.4 di atas, diketahui responden yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6 orang atau 100%. Sedangkan responden yang honorer atau PTT tidak ada.

Hasil yang dilakukann melalui wawancara terhadap beberapa responden maka dapatlah dilihat hasil wawancara dari keempat indikator implementasi dalam sistem informasi, yakni:

**A. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu proses antara seseorang atau kelompok, organisasi dan masyarakat dalam menciptakan hubungan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Menurut Edward dalam implementasi kebijakan tidak akan efektif jika tidak mencakup aspek bahwa setiap yang yang mengambil keputusan dan yang melaksanakan keputusan tersebut harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan, kebijakan yang dihasilkan dapat diteruskan oleh setiap anggota dengan ketepatan yang baik. Dalam aspek implementasi kebijakan sistem informasi pengelolaan arsip pada badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaannya pasti akan terdapat kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Kebijakan implementasi system informasi pada badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi Kepulauan Riau setiap kebijakan dan panduan yang di hasilkan harus jelas dan dapat dipahami oleh semua,karena jika tidak jelas dan tidak dapat dipahami akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan di lapangan,sehingga akan berdampak pada hasil yang kurang maksimal.

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni kejelasan, transmisi dan konsistensi.

#### **a. Kejelasan**

Dalam implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi kepulauan Riau jika hasilnya sesuai yang di inginkan maka setiap kebijakan harus dapat di terima oleh setiap pelaksana kebijakan. Tapi dalam pelaksanaan biasanya terdapat kebijakan yang masih kabur yang sulit di pahami oleh semua karena sistem penyampaian yang kurang maksimal. Jika ketidak jelasan itu terjadi dalam implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi Kepulauan Riau maka akan mendorong terjadinya pemahaman yang salah akan kebijakan yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, kejelasan merupakan salah satu sarat utama dalam menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan yang di harapkan.

Berikut hasil petikan wawancara penulis berkenaan dengan aspek kejelasan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan enam responden pada badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi Kepulauan Riau, dengan tanggapan sebagai berikut.

**Responden I** tentang kejelasan dalam berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam hal kejelasan berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik, belum ada kendala yang sangat berarti dalam melaksanakan pekerjaan, baik antara

atasan dan bawahan maupun sesama bawahan”. (wawancara Hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 11.30 Wib).

Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“Lumayan baik, tetapi terkadang masih ada terdapat miskomunikasi antara atasan dan bawahan”. ( Wawancara Hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 14.00 Wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti:

“Menurut saya, komunikasi yang terjalin dan yang saya rasakan sudah cukup”. ( Wawancara, hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 15.00 Wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden IV** kepada peneliti berkaitan dengan kejelasan dalam berkomunikasi:

“Baiklah, Kak. Karena,kan buktinya berjalan baik-baik saja”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 15.30).

**Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan kejelasan dalam berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

“Kejelasan komunikasi yang terjalin antara kami sudah baik karena saya merasakan sendiri dan tidak ada masalah yang berarti”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.00 Wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden VI** kepada peneliti berkaitan dengan kejelasan dalam berkomunikasi:

“Menurut saya komunikasi di sini baik-baik saja”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.15 Wib).

Berdasarkan teks wawancara yang diberikan kepada responden tentang kejelasan komunikasi pada tenaga kearsipan di Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Riau dapat dinyatakan sudah cukup baik, yakni terlihat bahwa setiap tenaga kearsipan telah

memahami kebijakan yang ditetapkan melalui komunikasi, baik antara atasan dengan bawahan maupun antara tenaga arsip bawahan dengan tenaga arsip bawahan lainnya, begitu juga komunikasi antara tenaga kearsipan dengan pengunjung perpustakaan dalam hal ini masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Kepulauan Riau yang membutuhkan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kearsipan dalam hal komunikasi telah berjalan baik sekalipun dalam pelaksanaannya terkadang masih terjadi ketidaksepahaman di lapangan.

#### b. Transmisi

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap komunikasi adalah transmisi. Dalam hal ini mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Misalnya adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Setiap unsur pimpinan di badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi kepulauan Riau hendaknya sebelum mengimplementasikan kebijakan kepada setiap unsur yang ada di BPAD harus menyadari bahwa kebijakan telah di hasilkan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam aspek ini seringkali terjadi kendala yang mengganggu efektifitas kebijakan yang dihasilkan. Perselisihan pendapat antara pelaksana dengan pengambil kebijakan tersebut karena ketidaksepahaman atas kebijakan yang dihasilkan tersebut. Kedua terkadang informasi atas kebijakan yang dihasilkan tidak sampai secara jelas karena berlapis-lapis hirarki birokrasi yang menyebabkan informasi kebijakan yang dihasilkan tidak terlalu utuh. Ketiga adanya keengganan pelaksana kebijakan untuk mengetahui setiap syarat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut dan terkadang pihak pelaksana kebijakan tersebut mengabaikan kebijakan yang sudah jelas dengan menduga duga makna substansi dari komunikasi kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan aspek transmisi yang terjadi pada badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi Kepulauan Riau penulis mendapatkan gambaran dari petikan wawancara dengan enam responden terkait dengan implementasi tersebut.

Berikut ini adalah tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh **Responden I** tentang transmisi dalam berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Selama ini tidak ada pertentangan karena kewajiban kami sebagai bawahan wajib mengikuti setiap kebijakan yang berlaku”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 11.40 Wib).

Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“Menurut saya berbeda pendapat tak menjadi masalah asalkan tidak menimbulkan konflik”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 14.10 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti:

“Baik-baik saja, Alhamdulillah, Kak! (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 15.10 wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden IV** kepada peneliti berkaitan dengan transmisi dalam berkomunikasi:

“Kadang-kadang terjadi juga pengabaian terhadap suatu kebijakan tapi secara keseluruhan pegawai di sini mengikuti aturan”. (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 15.40 wib).

**Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan transmisi dalam berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

“Alhamdulillah, menurut saya tidak ada masalah selama saya bekerja di sini selama 5 tahun”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.10 wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden VI** kepada peneliti berkaitan dengan transmisi dalam berkomunikasi:

“Cukup baik karena kami di sini berusaha menjalin suasana kekeluargaan.” (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.20 wib).

Masih berkaitan dengan transmisi dalam aspek komunikasi peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperkuat pertanyaan yang telah diajukan.

Berikut ini adalah tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh **Responden I** tentang transmisi dalam berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Tidak ada karena setiap kebijakan bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua staf yang ada”. (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 11.42 wib).

Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“Tidak ada, aturan itu dibuat untuk kebaikan dan kemajuan BPAD sendiri, berarti kalau kita menentang akan berpengaruh terhadap BPAD itu sendiri.” (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 14. 13 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti: (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 14. 13 wib).

“Ngak mungkin lah menentang, macam dah bosan saja kerja di sini”. (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 15. 13 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden IV** kepada peneliti:

“Kalau secara umum, saya rasa secara terang-terangan tidak ada, tapi tidak taulah kalau secara sembunyi-sembunyi”.  
(wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 15.42 wib).

**Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan transmisi dalam berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

“Mudah-mudahan tidak ada pertentangan di sini”. (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.11 wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden VI** kepada peneliti berkaitan dengan transmisi dalam berkomunikasi:

“Kalau dalam rapat biasanya ada silang pendapat tetapi, tidak dalam satu kebijakan yang berkaitan dengan keputusan mutlak karena setiap kebijakan yang diambil disesuaikan dengan undang-undang” (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.21 wib).

Transmisi kebijakan berkenaan dengan aspek komunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik. hal itu terlihat dari data yang diperoleh peneliti selama observasi berlangsung dengan wawancara sebanyak 6 responden yang menyatakan bahwa transmisi dalam aspek komunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan baik. sekalipun masih ada perbedaan pendapat, namun itu dirasa masih wajar karena perbedaan itu masih dapat diatasi dengan baik sehingga tidak mengganggu substansi dalam proses implementasi kebijakan yang dihasilkan.

c. Konsisten

Konsisten bermakna setiap kebijakan yang diambil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik oleh pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tersebut.

Konsistensi merupakan salah satu syarat agar implementasi kebijakan yang di hasilkan berjalan dengan efektif, maka perintah-perintah berkaitan dengan kebijakan tersebut harus jelas dan tidak berubah-ubah. Perintah-perintah yang tidak konsisten cenderung mendorong satu tindakan yang longgar oleh staf maupun unsur yang ada dalam mengartikan kebijakan yang dihasilkan.

Konsistensi merupakan hal yang sangat sulit diaplikasikan di lembaga manapun termasuk di badan perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Kepulauan Riau baik yang

bersifat individu maupun kelompok karena konsistensi membutuhkan kesadaran yang lebih dari setiap individu yang terkadang masih diabaikan itulah yang penulis temukan dari sebagian wawancara yang penulis lakukan terhadap enam responden yang telah penulis wawancarai untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancaranya.

Berikut ini adalah tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh **Responden I** tentang konsistensi dalam berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sudah, karena saya melihat setiap staf di sini mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat, hanya saja permasalahannya ada pada individu. Bagaimana kadar konsistensinya tersebut?” (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 11.45wib).

Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“Terkadang terjadi juga ketidakconsistenan, harap maklum ajalah kan tentunya atasan ngak mungkin donk seperti kita bawahan, mungkin atasan banyak juga hal yang harus dikerjakan di luar”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 14.15 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti:

“Maaflah, kak. Dalam hal ini saya no command!” (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 15.17 wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden IV** kepada peneliti berkaitan dengan konsistensi dalam berkomunikasi:

“Sulitlah, Dek. Saya menilainya, tetapi secara keseluruhan sudah lumayan baik, itulah yang saya rasakan selama ini”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 15.48 wib).

**Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan konsistensi dalam berkomunikasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:



“Saya hanya menerangkan bahwa kualitas konsistensi di sini sudah cukup baik, ya pastinya sedikit banyak ada kendala, saya rasa itu hal biasa. Dalam setiap lembaga manapun pasti mengalami hal yang sama”. (Wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.17 wib).

**Responden VI mengatakan sebagai berikut:**

“Ya, pasti adalah. Kan tidak semua orang sama. Apalagi jika atasan kan tidak mungkin sama porsi kejanya”.

(wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.22 wib).

Dalam hal konsistensi, peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan 6 responden yang menyatakan bahwa konsistensi pelaksanaan kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal karena terlihat dari hasil wawancara tersebut sebagian menyatakan belum maksimal karena di latar belakang beberapa faktor.

**B. Sumber-Sumber**

Sumber-sumber bermakna yang meliputi sumber daya yang dibutuhkan, staf yang sesuai dengan keahlian, informasi yang relevan dan memadai, kewenangan untuk memastikan apakah suatu kebijakan dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, dan fasilitas (termasuk gedung, peralatan, tanah dan perlengkapan) yang dibutuhkan dalam pelayanan). Sumber sumber memiliki peranan penting dalam implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada badan perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Kepulauan Riau karena jika salah satu sumber-sumber yang mendukung bermasalah maka akan berdampak besar terhadap implementasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam hal sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang sesuai disiplin ilmu yang di butuhkan. Berikut hasil petikan wawancara dengan enam responden berkaitan dengan sumber-sumber yang ada pada badan perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Kepulauan Riau

**Responden I** tentang sumber-sumber di BPAD Provinsi Kepulauan Riau, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Ya, mengenai tenaga kearsipan yang ada terdiri dari 3 orang yang berijazah D3 kearsipan sedangkan yang lainnya berasal dari ilmu umum, ada juga yang tamatan SMA. Menurut saya belum memadai, idealnya harusnya semua Sarjana kearsipan”. (wawancara hari Selasa, tanggal 05 November 2013, pukul 09.00 wib).

Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“Belum cukup karena sebagian besar belum sesuai dengan bidang ilmu yang diharapkan”. (wawancara hari Selasa, tanggal 05 November 2013, pukul 10.05 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti:

“Menurut saya, latar belakang pendidikan belum semua berlatar belakang kearsipan. Sementara ini mereka dilatih dengan mengikuti pelatihan-pelatihan”. (wawancara hari Selasa, tanggal 05 November 2013, pukul 11.00 wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden IV** kepada peneliti berkaitan dengan sumber-sumber :

“Dalam keterbatasan yang ada saya kira sudah lumayan cukup biarpun tidak berlatar belakang disiplin ilmu yang diharapkan”. (wawancara hari Selasa, tanggal 05 November 2013, pukul 13.15 wib).

**Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan sumber-sumber di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

“Ya...saya mengikuti yang ada aja, Dek. Semoga aja ke depannya ada penambahan tenaga yang sesuai dengan bidang keilmuannya”. (wawancara hari Selasa, tanggal 05 November 2013, pukul 14.00 wib).

**Responden VI** mengatakan sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari kerja selama ini bisa dikatakan baik soalnya selama ini tidak ada problem yang berarti”. (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.23 wib).

Sedangkan hasil wawancara mengenai sarana dan prasarana dari 5 responden memberi tanggapan sebagai berikut:

Tentang sumber-sumber mengenai sarana dan prasaran yang mendukung di BPAD Provinsi Kepulauan Riau, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

### **Responden I**

“Kalau boleh saya cakap masih sangat kurang fasilitas di sini, terutama gedung karena kita di sini masih sewa dengan pihak swasta, begitu dengan anggaran untuk mengadakan kegiatan pelatihan masih dirasa kurang”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 09.06 wib).

Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“Kalau jawaban dari sekretaris begitu, ya...memang begitulah keadaan di sini. Seharusnya kan sudah selayaknya BPAD Provinsi Kepulauan Riau memiliki gedung sendiri karena lingkup provinsi sangat besar”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 10.07 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti:

“Kurang!!! Coba Adek lihat sendiri, sempitkan? (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 11.02 wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden IV** kepada peneliti berkaitan dengan sumber-sumber :

“Menurut saya sarana dan prasarana masih sangat kurang, ya, karena banyak juga buku yang tidak bisa dipajang karena keterbatasan tempat. Saya sih berharap rencana BPAD mendapat gedung segera terealisasi”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 13.17 wib).

Berikutnya **Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan sumber-sumber di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

“Untuk sementara dengan keadaan yang begini, semaksimal mungkin memanfaatkannya, lumayan cukuplah”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 14.02 wib).

### **Responden VI mengatakan sebagai berikut:**

“Kurang, coba adek lihat tata letak buku-buku di sini kelihatan kurang baik penataannya., pastinya karena belum cukupnya tempat, dengar-dengar ini masih sewa”. (wawancara hari Senin, tanggal 04 November 2013, pukul 16.24 wib).

Masih berkaitan dengan sumber-sumber yang ada di perpustakaan dan arsip daerah perovinsi Kepulauan Riau penulis mewawancarai responden berkenaan dengan implementasi system informasi dalam pengelolaan arsip pada badan perpustakaan daerah Provinsi kepulauan riau. Berikut petikan wawancaranya :

### **Responden I**

“Sudah ada tapi jaringan internet hanya tersedia hanya di lingkungan BPAD saja, belum seperti yang Mira tanyakan kalo sistem informasi di sini, jadi kalau masyarakat ingin mengetahui buku-buku dan arsip lainnya harus datang ke sini”

Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“ Setahu saya belum seingat saya kita pernah mendapatkan bantuan serfer alat dari dari arsip nasional tapi belum dilaksanakan penuh, Kak”

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti:

“Bagusnya sih begitu tapi belumlah mudah-mudahan saja ke depannya begitu supaya masyarakat mudah mendapatkan informasi yang diperlukanya melalui internet”

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden IV** kepada peneliti berkaitan dengan sumber-sumber :

“Sudah terintegrasi dengan jaringan internet tapi kalau mau melihat koleksi buku yang tersedia di sini melalui perpustakaan arsip nasional, kurang lebih 13.000 lebih judul buku kita yang sudah terdaftar di perpustakaan arsip nasional tapi belum tercermin maksimal karena masyarakat belum bisa mengakses judul dan pengarangnya hanya ketersediaan bukunya saja kalau menurut saya karena sarana yang belum memadai dan anggaran juga menjadi masalah”

Berikutnya **Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan sumber-sumber implementasi sistem informasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

“ Setahu saya belum, kak. Tapi kalau di sininya, sih sudah tapi itu pun belum semua kemarin ada di ruang informasi bisa mengakses, tapi ke depannya sih memang begitu, semoga cepat terealisasi.”

Berikutnya responden terakhir yang penulis dapat wawancarai berkenaan dengan implementasi sistem informasi **Responden VI** mengatakan sebagai berikut:

“Saya tak begitu tahu masalah itu, tapi sepertinya sudah hanya saja belum maksimal pelaksanaannya, hanya di sini saja belum bisa dari luar”

Berdasarkan teks wawancara yang diberikan kepada 6 responden mengenai sumber-sumber kearsipan yang merupakan indikator dalam kelancaran implementasi sistem informasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sumber-sumber kearsipan dari penjelasan responden dapat dianalisa sebagai berikut: masih adanya tenaga kearsipan yang menjadi sumber dalam melakukan hal-hal kearsipan belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan padahal itu merupakan unsur yang sangat mendukung dan sesuai dengan instruksi pemerintah agar sesuatu pekerjaan di dasarkan sesuai dengan bidang keilmuannya, seharusnya agar kearsipan berjalan dengan maksimal harus diikuti dengan sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini yang berlatar belakang sarjana kearsipan dan pustakawan

Sedangkan sumber-sumber yang lain seperti sarana dan prasarana juga masih banyak dikeluhkan, baik oleh staf maupun oleh pejabat di lingkungan BPAD. Yang sampai saat ini masih belum memadai bahkan gedung yang digunakan saat ini masih sewa dengan pihak swasta seharusnya idealnya mengingat lingkup provinsi yang begitu luas seharusnya perpustakaan dan arsip daerah sudah selayaknya memiliki gedung sendiri yang memadai.

Dari rangkaian wawancara yang penulis lakukan dalam proses pengumpulan data berkaitan dengan sumber-sumber sarana dan prasarana yang ada saat ini belum mencukupi, itulah mayoritas responden mengatakan demikian. Dan harapan semua responden agar segera BPAD memiliki gedung sendiri sehingga proses pelayanan kepada masyarakat jauh lebih maksimal lagi.

Adapun berhubungan dengan aspek sistem informasi dalam pengelolaan arsip yang digunakan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau mayoritas masih menggunakan sistem manual dan bertahap dilakukan dengan sistem digital komputerisasi yang jauh lebih efisien, dan dari hasil wawancara dengan enam responden yang penulis wawancarai mengharapkan sistem informasi *online* bisa segera terealisasi dengan maksimal sehingga masyarakat baik kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat biasa bisa mengakses informasi yang di butuhkan yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau

### **C. Prilaku**

Prilaku adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan manusia baik yang diamati langsung atau yang tidak diamati oleh pihak luar ([web.dianhusadanuruleka.blogspot.com](http://web.dianhusadanuruleka.blogspot.com)).

Menurut Gibson (1996) prilaku adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang seperti berbicara, berjalan, berfikir atau tindakan dari suatu sikap. Berkenaan dengan prilaku yang terjadi di Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Riau, penulis berhasil memperoleh data dengan mewawancarai enam responden sebagai berikut :

**Responden I** tentang prilaku dalam implementasi sistem informasi yang mendukung di BPAD Provinsi Kepulauan Riau, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari latar pendidikan belum memadai karena sebagian besar tidak sesuai dengan disiplin ilmu kearsipan maupun pustakawan makanya disiasati dengan pelatihan

untuk menambah wawasan kearsipan dan pustaka”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 09.10 wib).

Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“Kalau dibilang mampu sekali, tidaklah tapi Alhamdulillah selama selama ini berjalan dengan baik”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 10.10 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti:

“Kalau saya berpendapat sebaiknya ditambah tenaga yang sesuai dengan disiplin ilmu dalam hal ini di bidang kearsipan dan pustaka”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 11.05 wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden IV** kepada peneliti berkaitan dengan sumber-sumber :

“Lumayan baik. Menurut saya sebaiknya untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang kearsipan dan pustakawan dilakukan pelatihan sesering mungkin”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 13.20 wib).

**Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan sumber-sumber di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

“Semoga saya tidak salah bicara, sebenarnya sih begitu belum memadai tapi sudah baik dan perlu ditingkatkan lagi”. (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 14.05 wib).

Dan yang terakhir **Responden VI** mengatakan sebagai berikut:

“Sebaiknya sesuai disiplin ilmu agar mencerminkan perilaku yang sesuai dengan bidang yang diembankannya”. (wawancara hari Selasa, tanggal 05 November 2013, pukul 16.25 wib).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 responden tentang perilaku atau sikap yang dilakukan oleh tenaga kearsipan dalam mengelola arsip-arsip yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kearsipan masih belum maksimal karena sebagian besar belum sesuai dengan disiplin ilmu, karena profesi ini membutuhkan kemampuan khusus di bidang kearsipan maupun pustaka, dan dibutuhkan perilaku yang sesuai dengan etika yang baik karena perpustakaan merupakan lembaga jasa yang melayani masyarakat secara langsung.

### **A. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan kerangka dan susunan perwujudan dari sebuah pola yang saling berhubungan dan dengan fungsinya masing-masing (Handoko, 2003:169 dalam pulolobuo.blogspot.com).

Struktur organisasi merupakan rangkaian kolektif yang saling membantu dan menguntungkan yang terdapat dalam pada lembaga pemerintahan maupun swasta yang mendukung kelancaran dari sebuah kebijakan dalam hal ini perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan objek yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data.

Berikut petikan wawancaranya:

**Responden I** tentang struktur organisasi dalam implementasi sistem informasi yang mendukung di BPAD Provinsi Kepulauan Riau, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sudah ada, kan bisa dilihat di ruang depan, implementasi dari struktur organisasi tersebut sudah berjalan hanya saja terkadang terjadi sedikit kendala. Biasanya berbenturan dengan waktu dan kesibukan yang ada”.

(wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 09.14 wib).



Berikutnya tanggapan atau jawaban yang diungkapkan oleh **Responden II** kepada peneliti:

“Pasti ada donk, kalau menurut kami kerjasama yang ada berjalan dengan baik-baik saja.” (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 10.15 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Responden III** kepada peneliti:

“Ya, yang namanya suatu badan pemerintah pasti ada struktur organisasinya. Dan susunan tersebut telah memiliki fungsi masing-masing. Dilihat dari bagian-bagian struktur sudah seharusnya saling bekerjasama.” (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 11.11 wib).

Selanjutnya disampaikan oleh **Responden IV** kepada peneliti berkaitan dengan struktur organisasi :

“Sudah ada, di mana pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, artinya kan baik dalam pelaksanaan.” (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 13.23 wib).

**Responden V** mengungkapkan kepada peneliti berkaitan dengan struktur organisasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

“Sudah ada, Alhamdulillah kerjasamanya pun sudah berjalan dengan baik.” (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 14.07 wib).

**Responden VI** mengatakan sebagai berikut:

“Ada, Baik-baik saja! (wawancara hari Selasa, tanggal 5 November 2013, pukul 16.26 wib).

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh 6 responden pada indikator mengenai struktur organisasi yang merupakan salah satu penunjang kelancaran implementasi sistem informasi dalam pengeolaan arsip pada BPAD Provinsi Kepulauan Riau dapat dianalisa bahwa struktur organisasi yang ada di BPAD Provinsi Kepulauan Riau

sudah ada dan setiap sistematisasi organisasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, mengenai bagian-bagian organisasi yang telah diberikan tugas masing-masing juga tetap memiliki kerjasama yang tinggi dan apabila terjadi kendala dapat diatasi dengan baik. Di samping itu juga pimpinan tetap melakukan penilaian dan pengawasan secara rutin demi kelancaran suatu organisasi dan tetap melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem kearsipan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada indikator struktur organisasi di BPAD Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya bagan organisasi sesuai dengan tujuan dan fungsinya

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi 4 indikator yaitu aspek komunikasi, aspek sumber-sumber, aspek perilaku dan aspek struktur organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab baik, hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator yang menjadi pengukuran dalam pelaksanaan sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga dikarenakan faktor-faktor kearsipan yang baik yang telah diperhatikan dan dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Dalam pembahasan indikator mengenai komunikasi yang merupakan bagian dari implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip dapat ditarik simpulan bahwa indikator komunikasi secara tepat dalam hal pelayanan secara tepat memiliki jawaban

yang baik sekalipun ada responden yang mengatakan masih ada mis komunikasi diantara mereka.

3. Pembahasan implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip mengenai indikator sumber-sumber di bidang kearsipan sudah dapat dikatakan memenuhi syarat kendatipun belum maksimal dan terus dilakukan perubahan ke yang lebih baik. Permasalahan yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah sarana dan prasana yang masih belum memadai dengan cakupan provinsi yang begitu luas seharusnya BPAD sudah memiliki gedung sendiri sedangkan yang ada saat ini masih sewa dengan pihak swasta, sumber daya manusia atau staf yang belum sesuai disiplin ilmu artinya staf yang ada tidak berlatar belakang kearsipan dan pustakawan, sitem informasi yang belum secara maksimal di implemantasikan dalam bentuk digital online karena keterbatasan sumber daya yang ada tapi terlihat dari hasil wawancara dengan enam responden pihak perpustakaan daerah terus berusaha secara maksimal agar perpustakaan kedepanya semakin maksimal baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya data dan fasilitasnya .
1. Pada indikator prilaku dan struktur organisasi yang merupakan penunjang implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat memenuhi syarat karena sudah sesuai dengan sistematika organisasi yang menunjang implementasi di BPAD provinsi Kepulauan Riau. sehingga implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip berjalan bagus.

Adapun Hambatan yang terjadi berdasarkan wawancara dengan enam responden pada implementasi sistem informasi pengelolaan arsip pada badan perpustakaan daerah

provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja yang maksimal dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai berikut:

- Ada terjadi miskomunikasi antara atasan dan bawahan
- Ada terjadi pengabaian terhadap suatu kebijakan
- Ada tenaga kearsipan yang belum sesuai dengan kedisiplinan ilmu

Sarana dan prasarana yang belum memadai

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, bagaimana implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip pada Perpustakaan Arsip dan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan telah baik.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya perumusan tanggung jawab dan kekuasaan bagi setiap bidang maupun tenaga-tenaga kearsipan agar terlaksanakan kebijakan-kebijakan dengan baik. Dan perlu adanya peningkatan akan keterampilan tenaga-tenaga kearsipan yang terlatih, serta sumber-sumber baik dalam sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan kearsipan.
2. Perlu adanya pemahaman dalam pengelolaan data-data perpustakaan, deskripsi terperinci, dan akurat mengenai kearsipan yang dilaksanakan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu intensitas pelatihan tentang kearsipan harus diadakan sesering mungkin karena pelatihan yang ada saat ini masih sangat kurang karena dalam satu tahun satu kali diadakan itupun partisipasinya masih rendah karena pelatihan yang diadakan kearsipan nasional memakan waktu yang lama.
3. Serta saran yang paling penting yaitu selalu adanya peningkatan penilaian dan pengawasan terhadap proses administrasi yang mencakup seluruh tahapan proses pengelolaan permasalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian

usaha kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan guna mencapai tujuan organisasi.

4. Membuat perencanaan agar SDM di badan perpustakaan dan arsip Provinsi kepulauan Riau agar sesuai dengan disiplin keilmuan di bidangnya masing-masing agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
5. Perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dalam hal ini Gubernur provinsi Kepulauan Riau terutama dalam hal sarana dan prasarana karena mengingat lingkup provinsi yang begitu luas sudah selayaknya BPAD memiliki gedung sendiri yang permanen sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gie The Liang, 2000. *Administrasi perkantoran modern*, liberti, Yokyakarta
- Handyaningrat, Soewarno. 1985. *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta PT. Gunung Agung
- Hasibuan, Melayu, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- James J. Spillane S.J, 2003 *Time Manegement Pedoman Praktis dan Pengelolaan waktu*
- Jogiyanto, 2005, *Analisia dan Desain sistem informasi*
- Nugroho, Riant. 2002. *Public Policy.: Dinamika Kebijakan- Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Gramedia
- Rock, David. 2007. *Enam Langkah Mengubah Kinerja Demi Kesuksesan Perusahaan Anda*. Jakarta: PT Gramedia

Sedarmayanti, 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju Jawa Barat, Jakarta

Sugiono, 2000. *Metode penelitian administrasi*, Bandung, Alfabeta

Syamsi Ibnu, 2007. *Efisiensi Kerja dan Sistem Prosedur Tata Kerja*, Jakarta. Bumi Aksara

Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung:API

[www.bpadkepri.com](http://www.bpadkepri.com) / *propil/ visi-misi*

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik:Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Wursanto,2011. *Sumber kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta

Yunianingsih dan Suwatno, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Alfabeta, Bandung